

Kebangkitan Tiongkok Sebagai Raksasa Baru Dunia Tahun 1976-2013

Nur Fajar Absor, Wahyudin, Arief Hidayat, Rahayu Permana

Universitas Indraprasta PGRI

Email: nur.fajarabsor@unindra.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the policies that carried out from the early days of Deng Xiaoping's leadership (1976) to the end of Hu Jintao's leadership (2013) which raised China to become one of the world's giants. The method used is a historical research method which consists of four steps, namely: (1) heuristic; (2) critic; (3) interpretation; and (4) historiography. The results obtained show that the rise of China as a new giant of the world was achieved through a long and ups and downs process, until finally the 'Four Modernizations' policies of Deng Xiaoping's era and the 'Science Development Concepts' of Hu Jintao's era made China one of the world's giants today. The Four Modernizations were carried out on aspects: (1) agriculture; (2) industry; (3) science and technology; and (4) national defense with the breakthrough made by Deng Xiaoping at that time, namely implementing 'Open Door Policy' to attract foreign investment and implementing the 'One Country, Two Systems', namely in the political field using socialism, but in the economic field using capitalism which aims to prosper the people. Meanwhile, the Science Development Concept launched by Hu Jintao views that innovation is the core of a country's competitiveness. The positive impact was that China's economic growth reached double digits and China also succeeded in launching its own rocket into space and was able to send its astronaut, Yang Liwei into earth orbit in 2002.*

Keywords: *Policy, Four Modernization, Science Development Concept*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang dilakukan mulai dari masa awal Deng Xiaoping memimpin (1976) hingga akhir kepemimpinan Hu Jintao (2013) yang membangkitkan Tiongkok menjadi salah satu raksasa dunia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah, yakni: (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi; dan (4) historiografi. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa bangkitnya Tiongkok sebagai raksasa baru dunia dicapai melalui proses yang panjang dan naik-turun, hingga akhirnya kebijakan 'Empat Modernisasi' era Deng Xiaoping dan 'Konsep Pengembangan Ilmu Pengetahuan' era Hu Jintao menjadikan Tiongkok sebagai salah satu raksasa dunia saat ini. Empat Modernisasi dilakukan pada aspek: (1) pertanian; (2) industri; (3) ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); dan (4) pertahanan nasional dengan gebrakan yang dilakukan Deng Xiaoping saat itu adalah melaksanakan 'Politik Pintu Terbuka' untuk menarik investasi asing dan memberlakukan sistem 'Satu Negara, Dua Sistem', yakni di bidang politik menggunakan sosialisme, namun di bidang ekonomi menggunakan kapitalisme yang bertujuan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat. Sementara itu, Konsep Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang dicanangkan Hu Jintao berpandangan bahwa inovasi adalah inti dari daya saing sebuah negara. Dampak positifnya, pertumbuhan

ekonomi Tiongkok mencapai dua digit dan juga Tiongkok berhasil meluncurkan roketnya sendiri ke angkasa dan mampu mengirimkan astronotnya, Yang Liwei ke orbit bumi pada 2002.

Kata Kunci: Kebijakan, Empat Modernisasi, Konsep Pengembangan Ilmu Pengetahuan

PENDAHULUAN

Tiongkok yang dikenal sebagai salah satu raksasa dunia merupakan negara yang berproses lama sebelum dikenal pada saat ini. Negara ini mengalami proses naik-turun dalam menjalani kehidupannya sebagai suatu bangsa dan negara. Hal ini bisa dilihat ketika pada zaman kuno yang masih berbentuk dinasti-dinasti, Tiongkok merupakan salah satu bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi, seperti didirikannya Tembok Raksasa Tiongkok, munculnya beberapa filsuf terkenal (Kung Fu Tzu dan Lao Tze), dan berbagai penemuan di antaranya kertas, bubuk mesiu, kompas, dan mesin cetak. Meski demikian, Tiongkok pada saat itu juga mengalami perpecahan dengan munculnya Dinasti Yuan dan Dinasti Manchu yang merupakan bangsa 'asing', yakni Mongol yang bukan merupakan bangsa 'asli' dari Tiongkok saat itu (Agung, 2012a; Wicaksono, 2017).

Tonggak penting bagi sejarah Tiongkok ialah pada 10 Oktober 1911 (*Wuchang Day/Double Ten Day*). Mereka melakukan revolusi yang menyebabkan Tiongkok memasuki babak baru dalam kehidupan sebagai negara yang kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Republik Tiongkok pada 1 Januari 1912 yang menggantikan Dinasti Manchu selama sekitar tiga abad lamanya dengan tokoh yang terkenal dan kemudian menjadi Presiden Tiongkok pertama, yakni Sun Yat Sen (Agung, 2012a; Sari, 2017).

Tiongkok kembali mengalami dinamika yang terjadi di dalam negaranya setelah Sun Yat Sen meninggal dunia, yakni pertentangan antara Kaum Nasionalis (Partai Kuomintang) dengan Kaum Komunis (Partai Komunis Tiongkok (PKT)). Kaum Nasionalis diwakili oleh Chiang Kai Shek, sedangkan Kaum Komunis diwakili oleh Mao Zedong. Pertentangan ini diakhiri dengan kemenangan Kaum Komunis pada 1 Oktober 1949 dengan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Mao Zedong sebagai kepala negaranya. Kaum Nasionalis sebagai pihak yang kalah harus meninggalkan daratan Tiongkok dan melarikan diri ke Taiwan (Agung, 2012b; Taniputera, 2011).

Mulai masa Mao Zedong inilah Tiongkok secara perlahan menjadi salah satu raksasa dunia dengan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Mao Zedong, seperti (1) Gerakan Lompatan Jauh ke Depan pada 1958-1960; (2) ikut serta dalam Perang Korea tahun 1950 dengan memihak kepada Korea Utara yang menunjukkan bahwa RRT dapat mengimbangi kekuatan militer Amerika Serikat (AS); dan (3) RRT menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB sejak 1971 menggantikan posisi Taiwan yang sebelumnya diakui sebagai sebuah negara yang mewakili Tiongkok (Agung, 2012b; Oktasari, 2016; Taniputera, 2011).

Ketika Deng Xiaoping menggantikan Mao Zedong sebagai pemimpin PKT pada 1976, Tiongkok makin diperhitungkan oleh negara-negara lain dengan keluarnya kebijakan Empat Modernisasi yang dilaksanakan antara tahun 1976-1980 (Agung, 2012b). Mulai dari masa ini, Tiongkok terbilang stabil menjadi salah satu raksasa dunia berkat kemajuan ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut.

Adapun, dalam artikel ini menggunakan teori konfusianisme yang berkembang di Tiongkok dan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok. Konfusianisme merupakan doktrin mengenai etika dan moralitas kemanusiaan demi tercapainya kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Konfusianisme mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarahnya, diawali dengan disalahkan oleh golongan Kiri, lalu mulai dirindukan, sampai akhirnya diselaraskan dengan kebijakan pemerintah Tiongkok. Hal ini dilakukan, karena nilai-nilai yang ada di dalam konfusianisme dan sosialisme-komunisme memiliki beberapa kesamaan, salah satunya adalah menempatkan negara sebagai pusat kekuasaan yang mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, konfusianisme ingin menciptakan keteraturan atau harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah Tiongkok pun menggunakannya untuk menghadapi westernisasi yang dihadapi masyarakatnya, sehingga yang muncul adalah 'Masyarakat Sosialis yang Harmonis' (Hartati, 2016; Muas, 2020).

Peneliti juga menggunakan teori modernitas yang diutarakan oleh Francis Fukuyama mengenai modernitas yang merupakan suatu universalitas dari negara-negara Barat, sehingga negara-negara Timur mengikutinya. Fukuyama berpendapat bahwa demokrasi liberal sebagai sistem pemerintahan merupakan konsensus di seluruh dunia yang mengalahkan ideologi lainnya, termasuk sosialisme-komunisme. Sehingga, hal tersebut menjadi 'titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia' yang menjadi 'akhir sejarah' (Jabpar, 2015; Wawaysadhya, 2019). Meskipun pendapat tersebut menimbulkan banyak kritikan, namun melihat kondisi di Tiongkok saat ini, dapat disimpulkan bahwa Tiongkok

pun menggunakan beberapa ideologi di dalam menjalankan pemerintahannya, yakni sosialisme, konfusianisme, dan kapitalisme. Tiga ideologi yang memiliki perbedaan dan ada beberapa yang bertentangan di dalamnya, namun semuanya digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya (Asyhari-Afwan, 2011; Mahfud, 2011). Kebangkitan Tiongkok ini menurut majalah *The Economist* (dalam Mahfud, 2011) seolah menandakan bahwa kemenangan liberalisme dan kapitalisme global menurut Fukuyama menjadi benar adanya.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas mengenai 'Kebangkitan Tiongkok Sebagai Raksasa Baru Dunia' dengan fokus dan tujuan pembahasannya adalah menganalisis kebijakan-kebijakan yang dilakukan mulai dari masa awal Deng Xiaoping memimpin (1976) hingga akhir kepemimpinan Hu Jintao (2013) yang membangkitkan Tiongkok menjadi salah satu raksasa dunia. Pada masa tersebut juga sempat ada sosok Jiang Zemin yang menyelinginya. Jiang Zemin terkenal dengan 'Teori Tiga Representasi', namun banyak kalangan yang berpendapat kalau konsep tersebut tidak terlaksana dengan baik oleh Jiang Zemin (Wicaksono, 2017). Selain itu, peneliti tidak membahas kebijakan-kebijakan Presiden RRT saat ini, Xi Jinping, karena masa pemerintahan Xi Jinping sedang berlangsung, hal ini dimaksudkan supaya penelitian ini lebih objektif dalam melihat kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah RRT. Sehingga, peneliti tidak memasukkan kedua tokoh tersebut ke dalam pembahasan di dalam artikel ini.

Adapun kebaruan dalam penelitian ini adalah melihat secara komprehensif kebijakan-kebijakan yang dilakukan Deng Xiaoping dan Hu Jintao dalam membangkitkan Tiongkok sebagai raksasa baru dunia.

Penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas kebijakan-kebijakan di satu periode pemerintahan saja (Sanjaya, Syaiful, & Syah, 2015; Utami, 2011; Wibawa & Arisanto, 2019).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah atau historis yang terdiri dari empat langkah, yakni: (1) heuristik yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan 'Kebangkitan Tiongkok Sebagai Raksasa Baru Dunia 1976-2013'; (2) kritik yaitu melakukan cek ulang menggunakan sumber-sumber yang didapatkan; (3) interpretasi yaitu melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber yang sudah diverifikasi; dan (4) historiografi yaitu menulis sejarah berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan (Kuntowijoyo, 2005; Sulasman, 2014; Zed, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

'Empat Modernisasi' Era Deng Xiaoping

Setelah Mao Zedong wafat pada 9 September 1976, penerusnya di dalam kepemimpinan PKT adalah Deng Xiaoping. Sebelumnya Deng Xiaoping merupakan kawan dekat sekaligus lawan politik Mao Zedong, karena terdapat beberapa perbedaan pandangan di antara mereka berdua. Mao Zedong dikenal sebagai seorang yang sosialis romantis, sedangkan Deng Xiaoping merupakan sosok yang realis dan melaksanakan kebijakannya secara hati-hati, bertahap, pragmatis, dan sabar (Santoso, 2017). Hal inilah yang menjadikan sosok Deng Xiaoping sebagai sosok yang berhasil mengubah citra Tiongkok secara positif, baik di dalam negerinya maupun di mata dunia.

Begitu kembali ke tampuk kepemimpinan PKT, Deng Xiaoping membuat gebrakan dengan meluncurkan kebijakan 'Empat Modernisasi' yang terdiri atas bidang: (1) pertanian; (2) industri; (3) ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); dan (4) pertahanan nasional yang dilaksanakan pada 1976-1980. Hal ini untuk menggantikan konsep Mao Zedong yang bernama 'Revolusi Kebudayaan'. Kebijakan tersebut awalnya dimaksudkan untuk merevolusi seluruh aspek dan lembaga kemasyarakatan di Tiongkok, namun dalam penerapannya kebijakan ini berimbas negatif kepada banyak kalangan, salah satunya adalah petani yang akhirnya dipaksa bekerja lebih keras akibat dari digalakkannya pertanian yang ditunjang oleh industri kecil di pedesaan untuk meningkatkan hasil panen. Hingga akhirnya, dampak yang diberikan dari kebijakan tersebut besar dan luas bagi masyarakat Tiongkok, salah satunya lebih dari 30 juta orang meninggal akibat kelaparan pada periode 1958-1961 (Agung, 2012b; Sanjaya et al., 2015).

Pada awal kepemimpinan Deng Xiaoping, kebijakan yang dilakukannya masih merupakan kebijakan pribadi, bukan konsensus nasional, baru pada Sidang Pleno Komite Sentral PKT ke-11 yang berlangsung pada Desember 1978, secara resmi RRT memutuskan akan melaksanakan kebijakan Empat Modernisasi dan menyatakan berakhirnya Revolusi Kebudayaan (Agung, 2012b).

Berbagai kebijakan pun dilakukan oleh Deng Xiaoping untuk dapat melaksanakan Empat Modernisasi, di antaranya adalah (Agung, 2012b; Bonavia, 1990; Sanjaya et al., 2015; Santoso, 2017; Wu & Benson, 2016):

- a. Mengganti sistem Komune Rakyat dan Brigade Produksi pada masa Mao Zedong dengan sistem Tanggung Jawab Keluarga di

bidang pertanian yang intinya adalah apabila ada kelebihan produksi setelah membayar kontrak kepada negara, maka hasilnya dapat dijual kepada pasar bebas. Kebijakan ini menghasilkan pembangunan, baik di kota maupun di desa secara pesat.

- b. Mengubah pola industri yang tadinya memberi porsi yang lebih besar kepada industri berat kemudian diganti ke pertanian dan industri ringan. Sasaran utamanya tetap pada industri berat, namun industri tersebut merupakan industri yang mendukung sektor pertanian.
- c. Memberi hak keputusan yang lebih besar kepada badan-badan daerah dan pimpinan industri.
- d. Memberikan prioritas tinggi kepada usaha-usaha kecil dan menengah.
- e. Memodernisasi iptek dengan cara memperluas materi kurikulum sekolah, yakni menambah berbagai disiplin keilmuan penghafalan-penghafalan doktrin Maoisme.
- f. Pembukaan kembali sistem ujian masuk sekolah dan universitas.
- g. Penciutan dan modernisasi Angkatan Bersenjata Tiongkok sebagai upaya pengendalian pengeluaran anggaran yang berlebihan.
- h. Pembersihan besar-besaran di lingkup pimpinan untuk menjamin agar para pejabat yang responsif dan kompeten dapat melakukan usaha-usaha pembangunan secara efektif.

- i. Melaksanakan 'Politik Pintu Terbuka' (*Open Door Policy/Kaifang*) dengan maksud untuk menarik investasi asing, karena para pemimpin Tiongkok saat itu menyadari pentingnya menjalin hubungan dengan negara lain. Sehingga, di RRT saat itu terdapat empat wilayah yang dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus, yakni Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen.
- j. Memberlakukan sistem 'Satu Negara, Dua Sistem' (*One Country, Two Systems*) yang bermaksud terdapat dua sistem di dalam satu negara, yakni kapitalisme dan sosialisme dijalankan di RRT. Deng Xiaoping berpandangan bahwa politik haruslah sosialis, namun ekonomi tidak harus sosialis, bahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bisa ditempuh dengan jalan kapitalis. Kapitalisme dijalankan di berbagai provinsi pesisir yang menghadap Hong Kong dan Samudera Pasifik sampai utara, sedangkan sosialisme dikembangkan dengan unsur-unsur modernisasi di bidang pertanian, industri, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dibangun di daerah pedalaman. Meski demikian, Deng Xiaoping menekankan bahwa pelaksanaan modernisasi harus berpedoman pada: (1) menganut jalan sosialis dengan konsekuensi bahwa PKT harus memiliki kepemimpinan yang dapat menjadi penggerak dari segenap pekerjaan; dan (2) menguasai keterampilan profesional yang bermaksud bahwa para kader PKT di samping 'merah' juga harus 'ahli' di bidang masing-masing termasuk pertanian, maka dari itu ipteknya harus juga dikuasai. Di kemudian hari,

sistem ini bisa disebut juga sebagai sistem Ekonomi Pasar Sosialis. Kebijakan ini juga menimbulkan sifat yang baru di dalam masyarakat Tiongkok, terutama generasi mudanya, yakni munculnya Konsumerisme Baru.

Dampak dari Empat Modernisasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping di satu sisi menimbulkan hal yang positif, namun di sisi lainnya menimbulkan hal yang negatif. Hal ini bisa dilihat dari (Agung, 2012b; Sanjaya et al., 2015):

- a. Dampak Positif: Pertumbuhan ekonomi pada saat itu rata-rata 9% setiap tahun dan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk RRT. Modal asing, industri, dan pertanian terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Membuka hubungan dengan luar negeri, terutama Amerika Serikat.
- b. Dampak Negatif: Berhubungan dengan bidang sosial yang menjadi 'bom waktu' bagi pemerintah RRT, di antaranya: (1) kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin akibat dari tidak meratanya hasil Empat Modernisasi; (2) inflasi yang tinggi, sehingga barang-barang menjadi mahal; (3) meningkatnya sifat konsumerisme, pergaulan bebas, seks bebas, dan prostitusi; (4) terjadinya penyalahgunaan wewenang, seperti KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme); (5) terjadinya salah urus dan penyalahgunaan kekuasaan antara pejabat pemerintah dan PKT; dan (6) derasnya arus urbanisasi, karena pemerintah RRT hanya menganjurkan supaya para warga desa tidak meninggalkan desanya, hal ini kemudian

menimbulkan banyaknya pengangguran yang berujung pada kriminalitas.

Selain itu, pada masa Deng Xiaoping di akhir tahun 1970-an, ia berulang kali menegaskan bahwa penyatuan kembali wilayah Hong Kong, Taiwan, dan Makau merupakan salah satu sasaran nasional utama di samping program Empat Modernisasi. Hong Kong dan Makau berhasil menjadi Wilayah Administrasi Khusus (*Special Administration Region* (SAR)) di dalam RRT masing-masing pada 1997 dan 1999 (Agung, 2012b; Taniputera, 2011). Hal ini dikarenakan RRT saat itu menerapkan kebijakan *One Country, Two Systems*.

'Konsep Pengembangan Ilmu Pengetahuan' Era Hu Jintao

Hu Jintao merupakan Presiden RRT yang memulai jabatannya pada 2002. Pada periode awal dirinya menjabat sebagai presiden, ia ditentang oleh kaum konservatif yang mengkritik dirinya sebagai seorang reformis yang tidak memiliki jiwa Marxisme-Maoisme, karena perkembangan Tiongkok saat dipimpin oleh reformis (Deng Xiaoping) menyebabkan maraknya privatisasi badan usaha milik negara, kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, modernisasi ala Barat yang mengancam kelestarian kebudayaan Tiongkok. Namun, hal ini ditangkis oleh Hu Jintao bahwa ia mencoba menjadikan Tiongkok sebagai negara adidaya baru di dunia untuk mengimbangi neo-imperialisme Barat. Ia mencetuskan 'Masyarakat Sosialis yang Harmonis'. Hal ini dimaksudkan bahwa Hu Jintao mengawinkan konsep kemajuan ekonomi dengan jalur sosialisme (Wicaksono, 2017). Terkait dengan gagasan ini, Hu Jintao meneruskan sistem Ekonomi Pasar Sosialis yang dicetuskan oleh Deng Xiaoping.

Pada saat itu Hu Jintao menyadari dampak yang merusak dari laju pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, maka dari itu ia mencetuskan gagasan tersebut. Dalam melaksanakan gagasannya tersebut, Hu Jintao dibantu oleh Wen Jiabao yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri RRT. Hu Jintao dan Wen Jiabao saat itu rajin menyambangi daerah-daerah miskin di pelosok Tiongkok dan mengedepankan kesetaraan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi, supaya kesenjangan kesejahteraan tidak semakin melebar. Saat itu, Hu Jintao meneruskan kebijakan Jiang Zemin bernama WDS (*Western Development Strategy*) untuk pemerataan pembangunan di bagian barat Tiongkok (Wibawa & Arisanto, 2019; Wicaksono, 2017).

Pada saat memerintah, Hu Jintao mereformasi pendidikan yang bertumpu pada tiga kebijakan pokok, yakni: (1) meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan mutu sekolah; (2) mendayagunakan sumber daya secara efisien untuk mendukung pelayanan pendidikan; dan (3) mengurangi disparitas pelayanan pendidikan dengan memperluas akses dan pemerataan pendidikan di wilayah pedesaan (Alhumami, 2010).

Hu Jintao juga mengembangkan konsep yang akan menjadi ciri khas kepemimpinannya, yakni 'Konsep Pengembangan Ilmu Pengetahuan'. Basis utama dalam konsep ini adalah rakyat harus menjadi dasar dari pengembangan dan kemajuan Tiongkok yang harus dicapai secara komprehensif. Hu Jintao memandang bahwa inovasi adalah inti dari daya saing sebuah negara, karena berdasarkan pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa hanya negara-negara yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan memiliki daya inovasi tinggi

yang bisa bertahan dalam kancah persaingan global. Menurutnya, level teknologi Tiongkok masih tertinggal dari negara-negara maju di dunia dan belum memenuhi kebutuhan pengembangan ekonomi dan sosial di berbagai bidang. Posisi pemerintah saat itu memegang peranan kunci dalam inovasi iptek, sedangkan orientasi pasar menjadi pengarah dari pengembangan ini (Alhumami, 2010; Wicaksono, 2017). Hal ini juga masih sejalan dengan sistem Ekonomi Pasar Sosialis.

Hu Jintao menganggap bahwa orang-orang yang berbakat memegang peranan kunci dalam inovasi yang menjadi motor penggerak dalam pembangunan nasional. Pemerintah Tiongkok saat itu mengembangkan mekanisme pemberian insentif yang lebih baik dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka untuk mendukung inovasi tersebut. Salah satu orang yang sukses dari perkembangan inovasi ini adalah Jack Ma yang melihat peluang dalam bisnis internet dengan mendirikan Alibaba di tahun 1999 yang menjadi salah satu raksasa *e-commerce* dunia saat ini dengan menjual produk-produk buatan Tiongkok ke seluruh dunia (Kristo, 2021; Lailliya & Indriastuti, 2020; Wicaksono, 2017).

Terkait dengan kebijakan ini, Hu Jintao menetapkan batas waktu selama 15 tahun dengan harapan bahwa setelah kurun waktu tersebut, Tiongkok akan sepenuhnya menjadi negara berorientasi inovasi yang tidak hanya berkembang dalam hal iptek, namun juga menjadikan masyarakat yang maju dan modern, tanpa meninggalkan ciri khas kebudayaan Tiongkok yang adiluhung (Wicaksono, 2017).

Dampak dari kebijakan Hu Jintao ini membuat perekonomian Tiongkok berkembang, bahkan pertumbuhannya mencapai dua digit. Dampak lainnya adalah Tiongkok sukses meluncurkan roketnya sendiri ke angkasa dan mampu mengirimkan astronotnya ke orbit bumi menyusul jejak AS dan Rusia (Uni Soviet) pada 2002 melalui sosok Yang Liwei. Selain itu, untuk mengakomodasi pengembangan Iptek, ratusan kampus baru dibuka dengan jumlah lulusan pada 2016 mencapai 4,1 juta orang, meski demikian hal ini menimbulkan masalah baru, yakni pengangguran, karena tidak terserap dengan baik di dunia kerja. Sementara itu, untuk menstabilkan perekonomian yang sudah dibangun, Hu Jintao menindak tegas tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hukuman paling berat yang dijatuhkan adalah hukuman mati (Alhumami, 2010; Santi, 2009; Wicaksono, 2017).

Untuk menjalin kerjasama dengan berbagai negara di dunia, Hu Jintao melakukan berbagai macam kerjasama, seperti: (1) membentuk Area Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ASEAN-China Free Trade Area/ACFTA) yang disepakati pada 2002 dan mulai diterapkan pada 2010; dan (2) membentuk BRICS pada 2009 dengan negara pendirinya adalah Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok, kemudian disusul Afrika Selatan yang bergabung pada 2010 (Kehi, 2020; Utami, 2011; Wicaksono, 2017).

Tiongkok juga menunjukkan kehebatannya kepada dunia ketika berhasil menyelenggarakan Olimpiade 2008 Beijing. Olimpiade tersebut merupakan usaha dari Tiongkok untuk membuktikan bahwa negara itu telah mencapai tingkat kedewasaan dan kemakmuran yang tinggi. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan reformasi ekonomi Tiongkok yang memungkinkan peningkatan taraf hidup rakyatnya melalui usaha

pariwisata dan penjualan cendera mata dalam *mega event* yang diselenggarakan saat itu. Untuk mendukung penyelenggaraan olimpiade, infrastruktur dibangun secara besar-besaran yang banyak menghabiskan dana. Selama penyelenggaraan olimpiade, Tiongkok juga menunjukkan kebersihannya, karena sebelum olimpiade, rakyatnya masih banyak yang membuang sampah dan meludah sembarangan serta polusi udara yang besar, namun semuanya dapat diatasi oleh pemerintah Tiongkok, selain itu Tiongkok juga berhasil menjaga keamanannya dari ancaman terorisme atau demonstrasi. Pada olimpiade ini, Tiongkok juga memecahkan rekor, yakni menjadi juara umum dengan mengantongi 51 medali emas mengalahkan AS dan Rusia yang selama ini bergiliran menjadi juara umum (Kasogi & Saeri, 2017; Wicaksono, 2017).

Terkait dengan persatuan bangsanya, memang beberapa kali Tiongkok menghadapi masalah ancaman disintegrasi bangsa yang bisa juga menurunkan citranya di mata internasional, karena Tiongkok sebagai sebuah negara memiliki beberapa suku dan etnis yang berbeda agama dan budayanya, seperti Tibet dan Uyghur. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan sensor ketat terhadap arus informasi. Hal ini tidak mengherankan, karena Uni Soviet yang begitu digdaya saat itu bisa ambruk akibat dari kebijakan Keterbukaan (*Glasnost*) yang dikeluarkan oleh Mikhail Gorbachev. Sensor ketat ini dilakukan di berbagai media massa, seperti surat kabar, majalah, televisi, dan terlebih lagi internet yang saat ini penggunaannya masif. Tiongkok sudah mengatur penggunaan internet sejak mengeluarkan undang-undang terkait kejahatan dunia maya pada 1997. Tiongkok memblokir beberapa situs global yang terkenal, seperti Facebook, Youtube, Twitter, dan Whatsapp melalui suatu

pengamanan yang disebut 'Tembok Api Besar' (Great Firewall) dan menggantinya dengan situs-situs yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan lokal, seperti RenRen, Youku Tudou, Weibo, dan WeChat (Hendri, 2014; Wicaksono, 2017). Istilah 'Tembok Api Besar' merupakan sindiran atas Tembok Besar yang sudah ada di Tiongkok sejak lama.

KESIMPULAN

Bangkitnya Tiongkok sebagai raksasa baru dunia dicapai melalui proses yang panjang dan naik-turun, dimulai dari zaman dinasti, Revolusi Tiongkok, hingga lahirnya RRT dengan sosialisme sebagai ideologi negaranya. Hal ini tidak lepas dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping (Empat Modernisasi) dan Hu Jintao (Konsep Pengembangan Ilmu Pengetahuan) di masa lalu. Hingga saat ini pun Tiongkok sedang berambisi menjadi negara adidaya dunia menggeser posisi AS pada 2050 dengan visi 'Made in China 2025' yang dimulai pada 2015 oleh Xi Jinping.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok tidak cepat berpuas diri dengan berbagai kemajuan yang dialaminya. Hal ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah yang begitu besar terhadap perkembangan negaranya. Berbagai negara pun dapat mengambil pelajaran dari kebangkitan Tiongkok tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dapat merefleksikan diri dari perkembangan Tiongkok untuk memajukan negaranya, karena sebenarnya Indonesia memiliki dasar negara yang begitu kuat, yakni Pancasila. Sehingga, seharusnya Indonesia menjadi negara yang maju apabila Pancasila bisa diterapkan

dengan baik di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, L. (2012a). *Sejarah Asia Timur 1*. Yogyakarta: Ombak.
- Agung, L. (2012b). *Sejarah Asia Timur 2*. Yogyakarta: Ombak.
- Alhumami, A. (2010). Transformasi Sosial-Ekonomi China. Retrieved from okezone.com website: <https://news.okezone.com/read/2010/09/22/58/374624/transformati-sosial-ekonomi-china>
- Asyhari-Afwan, B. (2011). Nasionalisme–Pragmatis: Pilihan Model Kapitalisme a la Cina. *Dewan Redaksi Clara Juwono*.
- Bonavia, D. (1990). *Cina dan Masyarakatnya*. Jakarta: Erlangga.
- Hartati, D. (2016). Konfusianisme dalam Kebudayaan Cina Modern. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 2(2), 174–179. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v2i2.25>
- Hendri, Y. (2014). *Sang Naga dari Timur*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jabpar, A. (2015). The End of History and The Last Man (Sebuah Studi Deskriptif atas Pemikiran Francis Fukuyama). *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 7(2).
- Kasogi, A., & Saeri, M. (2017). Kepentingan Tiongkok Melakukan Diplomasi Publik melalui Olimpiade Beijing 2008. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1–10.
- Kehi, D. C. (2020). *Analisis Rivalitas Hegemoni Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat Melalui Kebijakan Chinese Dream dan Free And Open Indo-Pacific di Kawasan Indo-Pasifik Tahun 2017-2018* (Vol. 10). Universitas Kristen Satya Wacana.
- Kristo, F. Y. (2021). Dulu Mesra, Kenapa Pemerintah China Sikat Jack Ma? Retrieved from detik.com website: <https://inet.detik.com/business/d-5321474/dulu-mesra-kenapa-pemerintah-china-sikat-jack-ma>

- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bentang Pustaka.
- Lailiya, F. C., & Indriastuti, S. (2020). *Implementasi Program Jalur Sutra Digital (Digital Silk Road) China*. Universitas Jember.
- Mahfud, C. (2011). *Antara Komunisme, Kapitalisme dan Konfusianisme*. Dewan Redaksi Clara Juwono.
- Muas, R. T. N. M. E. (2020). Konfusianisme Sebagai Sabuk Pengaman RRT. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 10(2), 206–224. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v10i2.306>
- Oktasari, W. (2016). *Peran Mao Zedong Dalam Perekonomian Cina Tahun 1949-1960*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Sanjaya, R., Syaiful, M., & Syah, I. (2015). Peranan Deng Xiaoping Dalam Reformasi Cina Tahun 1978. *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, 3(1).
- Santi, J. T. (2009). Sosialisme Gaya China. Retrieved from kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2009/10/03/05394937/sosialisme.gaya.china?page=all>
- Santoso, L. (2017). *Para Penggerak Revolusi*. Yogyakarta: Laksana.
- Sari, E. N. (2017). *Sistem Ekonomi Politik Cina (Studi Kasus: Peralihan Sistem Ekonomi Sosialisme Menuju Sistem Ekonomi Kapitalisme)*. Universitas Sumatera Utara.
- Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, dan Contoh Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taniputera, I. (2011). *History of China*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Utami, P. (2011). *Implementasi Strategi Sun Tzu Dalam ACFTA Oleh Pemerintah China Pada Masa Kepemimpinan Hu Jintao Fokus Penelitian: Masa Early Harvest Programme (2004-2009)*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Wawaysadhya, W. (2019). Refleksi Filosofis Terhadap Konsep Sejarah Francis Fukuyama dari Buku *The End Of History And The Last Man*. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 2(2), 39–48.

- Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2019). Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antardaerah pada Masa Kepemimpinan Jiang Zemin dan Hu Jintao. *Nation State: Journal of International Studies*, 2(2), 105–122.
- Wicaksono, M. (2017). *Republik Rakyat China-Dari Mao Zedong Sampai Xi Jinping*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wu, H., & Benson, S. A. (2016). Made in China 2025 and New Trends of Entrepreneurship Education of China: A Socio-Economic-Educational Perspective. *Asian Education Studies*, 2(1), 10.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Obor.